

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022

Eri Nurhayana^{1*}, Daryono Soebagiyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹erinnurhayana@gmail.com, ²daryono51@gmail.com

^{*}erinnurhayana@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal menjadi elemen penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), konsumsi pemerintah, dan investasi) terhadap pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menyelidiki dampak serta pengaruh kebijakan fiskal menggunakan model Ordinary Least Square (OLS), dengan data berjenis sekunder dari tahun 2008 hingga 2022 yang di peroleh dari BPS. Hasil analisis menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal yang tercermin dalam peningkatan konsumsi dan investasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel APBN tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan panduan bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, APBN, Konsumsi Negara, Investasi

Abstract

Fiscal policy is an important element in efforts to achieve sustainable economic growth in Indonesia. This research aims to analyze the impact of fiscal policy (State Revenue and Expenditure Budget (APBN), government consumption and investment) on economic growth over the last few years. This research investigates the impact and influence of fiscal policy using the Ordinary Least Square (OLS) model, with secondary data from 2008 to 2022 obtained from BPS. The results of the analysis show the importance of fiscal policy which is reflected in a significant increase in consumption and investment in economic growth. Meanwhile, the APBN variable does not have a significant impact on economic growth. The implications of these findings can provide guidance for the formulation of more effective fiscal policies to support economic growth in the future.

Kata kunci: Economic Growth, Fiscal Policy, State Budget, State Consumption, Investment

PENDAHULUAN

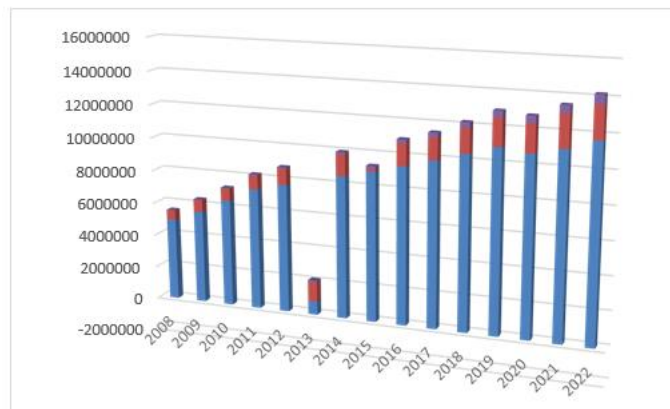
Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingginya pertumbuhan akan ekonomi dapat memberikan solusi untuk beberapa permasalahan makroekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi telah diperdebatkan baik secara teoritis maupun empiris. Fokus perdebatan terletak pada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen yang diperkenalkan oleh Barro (1990), Barro dan Sala-i-Martin (1992), Romer (1990; 1996; 2001) menekankan bahwa teknologi endogen merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nursini, 2017).

Demikian pula, menurut (Wulandari et al., 2020) (Wulandari et al., 2020), teori perdagangan internasional baru juga menegaskan bahwa transfer teknologi melalui aliran barang dan jasa dari luar negeri akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di negara asal. Kedua teori tersebut sama-sama menekankan pentingnya kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Instrumen makroekonomi yang berperan penting untuk mendorong teknologi yang selanjutnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan. Kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan merupakan hal yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi Indonesia periode 2013-2023. Pada periode ini, hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi cukup menarik untuk diestimasi. Pada periode 2003-2013, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi rata-rata 7,4% per tahun, namun pada periode tersebut kebijakan fiskal relatif kurang ekspansif dan rasio ekspor ditambah impor terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai proksi keterbukaan perdagangan belum cukup baik meningkat secara signifikan (Wijayanti & Ngadiman, 2020).

Kebijakan fiskal pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pandangan ini menyatakan bahwa operasi keuangan pemerintah hanya berperan dalam mengalihkan sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah dengan tetap meminimalkan dampak yang signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Namun, Keynes (Keynes, 1936) mengubah pandangan ini dengan mengemukakan konsep baru (Teori Keynesianisme). Menurut Keynes, kebijakan fiskal pemerintah memiliki pengaruh makro yang penting. Ia menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi pendapatan agregat secara keseluruhan. Teori Keynesianisme juga memperkenalkan konsep dampak berganda atau multiplier effect dari pengeluaran pemerintah. Dampak ini terjadi ketika kenaikan pengeluaran pemerintah merangsang peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong lebih banyak lagi pengeluaran dan kegiatan ekonomi lainnya, menciptakan efek berganda yang lebih besar daripada jumlah pengeluaran awal pemerintah (Sriyalatha & Torii, 2019).

Salah satu faktor kunci, selain dampak pengeluaran pemerintah pada produksi, adalah konsistensi kebijakan fiskal dengan perubahan siklus bisnis ekonomi. Pada dasarnya, kebijakan fiskal diharapkan berfungsi sebagai penyesuaian otomatis dalam

dinamika perekonomian. Dengan kata lain, ketika ekonomi sedang mengalami pertumbuhan, pengeluaran pemerintah seharusnya cenderung menurun atau pendapatan pajak meningkat. Sebaliknya, pada periode kontraksi ekonomi, kebijakan fiskal diharapkan bersifat ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berperan sebagai alat pengendali otomatis dalam mengelola perubahan ekonomi yang berarti bahwa kebijakan tersebut harus berfungsi secara kontracyclical, yaitu berlawanan arah dengan pergerakan siklus bisnis. Dengan menggunakan instrumen fiskal yang tepat, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi fluktuasi yang berlebihan dalam perekonomian (Sriyalatha & Torii, 2019).



Gambar 1: Data PDB, APBN, Konsumsi Pemerintah, dan Tingkat Investasi di Indonesia 2008-2022

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Dari data yang disajikan dalam gambar 1 mengenai PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode ini, meningkat dari sekitar 4,948 triliun rupiah padatahun 2008 menjadi sekitar 11,711 triliun rupiah pada tahun 2022. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga meningkat selama periode ini, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan belanja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi pemerintah bervariasi selama periode ini, dengan peningkatan dan penurunan. Namun, secara keseluruhan, konsumsi pemerintah telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari sekitar 20 juta dolar pada tahun 2008 menjadi sekitar 552 juta dolar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan minat dalam investasi di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azizah pada tahun 2021, disebutkan bahwa meskipun ada fluktuasi tahunan, Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi positif selama periode ini. Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama tahun 2008-2022, dengan peningkatan PDB, APBN, konsumsi pemerintah, dan tingkat investasi. Hal ini mencerminkan stabilitas ekonomi dan upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara (Azizah, 2021).

Pada tahun 2016, konsumsi pemerintah mencapai -0,14%, yang merupakan yang terendah dalam rentang waktu yang dianalisis. APBN mengalami peningkatan yang

signifikan sejak tahun 2011 hingga 2022, mencerminkan upaya pemerintah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya (Fitrianasari, 2021). Pada tahun 2022, APBN mencapai 11,71 triliun rupiah, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama periode tersebut, tingkat investasi juga mengalami peningkatan yang relatif stabil. Tingkat investasi yang lebih tinggi dapat menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan data menunjukkan bahwa Indonesia telah berusaha untuk mencapai hal ini (Wulandari et al., 2020). Meskipun ada fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi selama periode ini, data menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti penurunan konsumsi pemerintah dan peningkatan APBN, telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Syamfitri Nur, Cahyani & Nanda selain itu, tingkat investasi yang relatif stabil juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu penting untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang (Cahyani et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal, sebagaimana yang diuraikan oleh (Riani & Hr, 2022), melibatkan upaya pemerintah untuk merubah sistem pajak atau pengeluarannya guna mengatasi tantangan ekonomi. Dua fokus utama dalam kebijakan ini mencakup penanganan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PNPBP) serta permasalahan terkait di APBN, di mana defisit muncul saat pendapatan pemerintah lebih rendah dari pengeluarannya. Selain itu, fokus kebijakan fiskal juga melibatkan upaya dalam menangani stabilitas ekonomi makro, yang mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, lapangan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran (Sriyalatha & Torii, 2019). Efek kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi selalu bersifat positif, sementara terhadap tingkat inflasi diperkirakan cenderung bersifat negatif.. Meskipun demikian, dalam konteks teoritis, penerapan kebijakan fiskal mengambang, yang melibatkan peningkatan belanja publik tanpa peningkatan sebanding pada sumber daya fiskal sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, diperkirakan akan menyebabkan defisit anggaran meningkat (Medee & Nenbee, 2011).

Dalam upaya mengelola anggaran dan pengeluaran negara, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal untuk mempengaruhi dinamika ekonomi. Ini mencakup lebih dari sekadar regulasi fiskal, melibatkan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah guna memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai strategi perencanaan pendapatan dan pengeluaran publik yang bertujuan membantu pemerintah mengendalikan siklus bisnis, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang pekerjaan penuh, dan melindungi dari risiko inflasi yang tinggi (Cebula & Mixon, 2012). Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mencapai penuhnya Penyerapan tenaga kerja dapat

disinonimkan dengan penciptaan lapangan kerja, sementara menjaga stabilitas harga komoditas dapat diungkapkan sebagai pengendalian harga barang. Ekonomi negara berkembang, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di sektor riil. Dengan meningkatnya daya beli yang disuntikkan ke dalam perekonomian, permintaan mengalami peningkatan, sedangkan pasokan cenderung tetap relatif stabil karena adanya kekakuan struktural dan ketidaksempurnaan pasar. Situasi ini dapat mengakibatkan kenaikan inflasi harga (Medee & Nenbee, 2011).

Terlepas dari efek pengeluaran publik terhadap produksi, aspek penting lainnya adalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus ekonomi. Dalam situasi ideal, kebijakan fiskal harus berperan sebagai stabilisator ekonomi otomatis. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, diharapkan pengeluaran pemerintah menurun atau pendapatan pajak meningkat. Ketika perekonomian mengalami kontraksi, langkah-langkah kebijakan fiskal harus bersifat ekspansif melalui peningkatan belanja atau pengurangan penerimaan pajak. Sehingga, fungsi stabilisator otomatis dalam kebijakan fiskal seharusnya secara alamiah berperan sebagai kebijakan kontrasektoral secara otomatis (Sriyalatha & Torii, 2019).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan peningkatan output, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah, merupakan fokus utama dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ini bertujuan untuk meningkatkan output perkapita dalam jangka panjang, produksi per kapita melibatkan tiga aspek kunci, yaitu proses, produksi per kapita, dan perencanaan jangka panjang, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan kuantitas produksi tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan per individu dalam masyarakat (Cebula & Mixon, 2012). Pertumbuhan ekonomi bukanlah gambaran statis dari keadaan ekonomi pada satu titik waktu, melainkan sebuah proses dinamis yang menggambarkan bagaimana perekonomian berkembang atau berubah seiring berjalannya waktu. Fokusnya terletak pada evolusi atau perubahan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan atau daya tahan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi untuk kebutuhan penduduknya yang bisa terwujud melalui kemajuan atau penyesuaian (Basuki et al., 2020).

Perkembangan ekonomi mencakup aspek yang lebih luas, melibatkan transformasi keseluruhan struktur ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha terstruktur untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, dengan fokus pada peningkatan sistem kelembagaan. Proses pembangunan ekonomi mencerminkan dinamika perubahan yang berkelanjutan, dengan penekanan pada upaya berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Secara menyeluruh, pembangunan ekonomi juga mencakup peningkatan sistem kelembagaan di berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya (Jaelani, 2020). Penilaian terhadap sistem ini dapat dilakukan melalui dua perspektif, yakni perbaikan pada sektor

organisasi (institusi) dan perbaikan pada sektor regulasi, termasuk dalam ranah legal formal maupun informal. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara guna meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh unsur dalam negara menjadi sangat penting dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut (Tanjung et al., 2019).

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan total produksi atau output yang dihasilkan oleh pemerintah, menggambarkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. Konsep ini digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pada pembangunan ekonomi regional, fokus diberikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama untuk mengevaluasi pencapaian ekonomi dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Melalui data PDRB, pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dapat dianalisis, PDRB merangkum total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu, tanpa memperhitungkan aspek kepemilikan (Nurlia et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan harga konstan, mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dari satu tahun ke tahun berikutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan bahwa ada tiga metode perhitungan PDRB, yaitu melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Habibah et al., 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)

APBN adalah perencanaan keuangan yang matang untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban Negara. Fungsi utama APBN adalah sebagai panduan pengelolaan Negara pada periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta sebagai instrumen pemantauan terhadap kapabilitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah diputuskan. Di Indonesia, penggunaan istilah APBN telah berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan untuk menggambarkan APBN. APBN mencerminkan tata kelola keuangan Negara yang teratur, sesuai dengan peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap tahun, pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang APBN sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan proses perencanaan keuangan negara secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik kepada lembaga yang berwenang untuk dibahas bersama Ansori, A. R.

Konsumsi

Teori konsumsi Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, adalah kerangka kerja penting dalam ekonomi makro. Teori ini menekankan hubungan antara pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi dalam suatu ekonomi. Dalam teori ini, ada beberapa konsep kunci yang memengaruhi perilaku konsumen. Keynes

berpendapat bahwa tingkat konsumsi seseorang bergantung pada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar konsumsi. Namun, Keynes juga memperkenalkan konsep propensi margin konsumsi, yang menyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat, penambahan konsumsi tidak sebanding. Artinya, sebagian pendapatan tambahan tersebut akan disimpan. Propensi margin konsumsi adalah konsep kunci yang menjelaskan bahwa konsumen cenderung menyimpan sebagian dari pendapatan tambahan mereka. Hal ini terkait dengan adanya ketidakpastian dan faktor ekspektasi dalam ekonomi. Keynes percaya bahwa ekspektasi ekonomi dan tingkat ketidakpastian memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Jika konsumen merasa yakin tentang masa depan dan memiliki ekspektasi positif tentang pendapatan, mereka lebih cenderung untuk menghabiskan lebih banyak dan mengurangi tabungan. Tingkat investasi oleh perusahaan juga memengaruhi tingkat konsumsi. Investasi yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat konsumsi. Teori konsumsi Keynesian memiliki implikasi kebijakan yang penting, terutama dalam situasi ketika ekonomi menghadapi resesi atau tingkat pengangguran tinggi. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat berperan dalam merangsang konsumsi dan investasi melalui kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan penuh tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Teori ini telah memengaruhi banyak kebijakan ekonomi di seluruh dunia dan tetap menjadi konsep kunci dalam studi ekonomi makro (Keynes dalam Sriyalatha & Torii, 2019).

Investasi

Investasi adalah suatu proses penempatan sejumlah dana dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan nilai, atau menghasilkan keuntungan yang positif di masa depan. Hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya ke dalam aset atau proyek yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan nilai. Investasi dapat berupa penanaman uang dalam bentuk modal, properti, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan dari investasi adalah untuk mencapai pertumbuhan modal atau penghasilan pasif di masa yang akan datang. Dalam mengambil keputusan investasi, faktor-faktor seperti periode waktu, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa depan harus dipertimbangkan. Investasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan periode waktunya, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti investasi dalam perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai kekayaan perusahaan atau dalam bentuk pembelian barang modal untuk meningkatkan persediaan modal individu atau perusahaan. Komponen investasi merupakan bagian penting dari Produk Domestik Bruto suatu negara yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi. Keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendapatan individu atau perusahaan, tingkat suku bunga, serta ekspektasi tentang kondisi ekonomi di masa depan. Pertumbuhan pendapatan dapat mendorong peningkatan investasi, sedangkan tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat untuk berinvestasi karena biaya pinjaman yang lebih mahal (Tandelilin, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah menggunakan deskriptif kuantitatif, dalam analisis kuantitatif, kita dapat menggunakan beberapa teknik statistik untuk menguji hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia. Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, khususnya menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik, berupa data time series tahunan dari 2008 hingga 2022 yang mencakup variabel seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Konsumsi Pemerintah, dan Investasi. Analisis regresi menjadi pendekatan umum dalam penelitian ini. Langkah awal melibatkan identifikasi variabel dependen dan independen, dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) sebagai variabel dependen, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), konsumsi pemerintah, serta tingkat investasi sebagai variabel independen. Analisis regresi kemudian dilakukan untuk menggali hubungan antara variabel independen (APBN, konsumsi pemerintah, dan tingkat investasi) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

Berikut adalah hasil analisis regresi menggunakan data yang diberikan:

$$PDB_t = \beta_0 + \beta_1 APBN_t + \beta_2 KONSUM_t + \beta_3 INV_t + e_t$$

Dimana:

β_0	: Konstanta
$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien variabel independent
PDB	: Produk domestik bruto (milyar rupiah)
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (milyar rupiah)
KONSUM	: Konsumsi Pemerintah (%)
INV	: Investasi (juta dollar)
t	: Time series
e	: Residual

Analisis regresi ini membantu menguji dampak dan pengaruh kebijakan fiskal yang mencakup APBN, konsumsi pemerintah, dan tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan menggunakan dataset time series tahunan dari 2008 hingga 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis dan diskusi mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008-2022. Metode analisis yang diterapkan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews 9. Data yang menjadi fokus penelitian merupakan data time series yang dipresentasikan dalam Tabel 1. Pengujian asumsi klasik akan mencakup evaluasi terhadap multikolinieritas, normalitas residual, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Temuan hasil analisis akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik

$PDB_t = 10054106 - 2.826653 APBN_t - 624624.7 KONSUM_t + 18.45376 INV_t + e_t$			
(0.0002)*	(0.1114)	(0.0259)*	(0.0031)*
$R^2 = 0.761852$; DW-Stat. = 2.115451; Prob. F-Stat. = 0.000942			

Uji Diagnosis

- (1) Multikolinieritas (VIF)
PDB = APBN = 3.879579; KONSUM = 1.239587; INV = 3.572715
- (2) Normalitas Residual
JB(2) = 9.9021; Prob. JB(2) = 0.0770
- (3) Autokorelasi
 $X^2(2) = 1.8663$; Prob. $X^2(2) = 0.3933$
- (4) Heteroskedastisitas
 $X^2(9) = 14.486$; Prob. $X^2(9) = 0.1060$

Sumber: Data diolah dengan *eviews 9*.

Keterangan: Tanda asterisk (*) menunjukkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Angka dalam kurung menyajikan probabilitas t-statistik.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
APBN	3.879579
KONSUMSI	1.239587
INVESTASI	3.572715

Sumber: Data diolah dengan *eviews 9*

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai VIF untuk variabel APBN sebesar 3.8795794, variabel Konsumsi sebesar 1.239587, dan variabel Investasi sebesar 3.572715. Nilai dari hasil tersebut kurang dari 10 artinya data tersebut tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Prob. JB
990.212	0.07707

Sumber: Data diolah dengan *eviews 9*

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas (Jarque-Bera) sebesar 0.077076, melebihi tingkat signifikansi umum $\alpha = 0.05$ atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi yang dapat

dianggap normal. Sehingga, kesimpulannya adalah distribusi data tersebut dapat dianggap normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.639453	Prob. F(2,9)	0.5500
Obs*R-squared	1.866307	Prob. Chi-Square(2)	0.3933

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Berdasarkan informasi dari Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.3933 lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ atau 5%. Kesimpulannya, dapat diutarakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedasticity Test: White

F-statistic	1.568.747	Prob. F(9,5)	0.0037
Obs*R-squared	1.448.696	Prob. Chi-Square(9)	0.73611
Scaled explained SS	1.801.269	Prob. Chi-Square(9)	0.24306

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Berdasarkan informasi dari Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa probabilitas Chi-Square memiliki nilai sebesar 0.73611. Karena nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ atau 5%, maka kesimpulannya adalah data tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10054105	1887086.	5.327848	0.0002
APBN	-2.826653	1.633118	-1.730832	0.1114
KONSUMSI	-624624.7	242833.9	-2.572230	0.0259
INV	1.845376	4.889498	3.774162	0.0031
R-squared	0.761852	Mean dependent var		8310358.
Adjusted R-squared	0.696903	S.D. dependent var		2936324.
S.E. of regression	1616572.	Akaike info criterion		3.165.269
Sum squared resid	2.87E+13	Schwarz criterion		3.184151
Log likelihood	-2.333952	Hannan-Quinn criter.		3.165068
F-statistic	1.172992	Durbin-Watson stat		2.115451
Prob(F-statistic)	0.000942			

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 9

Dari hasil regresi pada tabel 6 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
 $PDB = 10054105 + -2.826653APBN + -624624.7Konsumsi + 1.845376INV + e$
 Dengan merujuk pada hasil perhitungan sebelumnya, penafsiran koefisien regresi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10054105, maka jika APBN, Konsumsi, dan Investasi nilainya adalah 0, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 10054105
2. Koefisien regresi variabel APBN adalah sebesar -2.829953, maka jika APBN naik sebesar 1 milyar rupiah, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 2.829953 milyar rupiah.
3. Koefisien regresi variabel konsumsi adalah sebesar -624624.7, maka jika Konsumsi naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 624624.7 milyar rupiah.
4. Koefisien regresi variabel Investasi adalah sebesar 1.845376, maka jika Investasi naik sebesar 1 juta dollar, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1.845376 milyar rupiah.

Intepretasi Koefisien Determinasi

Data dari Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R² mencapai 0.7618, menandakan bahwa sekitar 76.18% variasi dalam Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel APBN, Konsumsi, dan Investasi. Sisanya, sekitar 23.82% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model tersebut.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

F-statistic	Prob (F-statistic)	Keterangan
11.72992	0.00094	Ada pengaruh

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Dari hasil uji F, ditemukan bahwa nilai F-statistik sebesar 11.72992 dengan Prob. F-statistik sekitar 0.00094, yang kurang dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara bersama-sama, APBN, Konsumsi, dan Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji T

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	5.327848	0.0002
APBN	-1.730832	0.1114
KONSUMSI	-2.572230	0.0259
INV	3.774162	0.0031

Sumber: Data diolah dengan eviews 9

Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa variabel KONSUMSI dan INV signifikan secara statistik dengan dampak dan pengaruh yang signifikan, sementara variabel APBN mungkin tidak signifikan, karena prob. t lebih besar dari $\alpha = 0.05$.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi dalam jangka panjang, diukur melalui PDB, fokus pada dinamika perubahan ekonomi. Pembangunan ekonomi mencakup perubahan menyeluruh dengan peningkatan pendapatan per kapita dan perbaikan sistem kelembagaan. Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan total produksi dalam suatu negara. Konsumsi pemerintah adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, sementara investasi melibatkan alokasi dana untuk pertumbuhan atau penghasilan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam rentang waktu 2008-2022, dapat disimpulkan bahwa berbagai faktor memainkan peran yang berbeda dalam membentuk dinamika ekonomi negara ini. Secara khusus, konsumsi pemerintah terbukti memiliki dampak yang signifikan dan memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Keterlibatan pemerintah dalam mengelola konsumsi mendorong arah pertumbuhan ekonomi yang positif. Tingkat investasi juga terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan bahwa kebijakan yang mendukung investasi yang cerdas dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk peningkatan produktivitas dan lapangan kerja. Di sisi lain, Analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa faktor ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Meskipun APBN memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan negara, hasil analisis menunjukkan bahwa dampaknya mungkin tidak sebanding dengan konsumsi pemerintah dan tingkat investasi dalam memacu aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. H. (2021). Kebijakan Fiskal Islam Sebagai Solusi Dalam Memulihkan Dan Meningkatkan Perekonomian Negara Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 16(2), 133–145. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4518%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/4518/3194>
- Basuki, A. T., Purwaningsih, Y., Soesilo, A. M., & Mulyanto, M. (2020). The Effect of Fiscal Policy and Foreign Direct Investment on Regional Economy in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5031>
- Cahyani, S. N., Safitri, V., & Nanda, Y. T. (2021). Pengaruh APBN, Kebijakan Fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(1), 50–63.
- Cebula, R. J., & Mixon, F. G. (2012). The Impact of Fiscal and Other Economic Freedoms on Economic Growth: An Empirical Analysis. *International Advances in Economic Research*, 18(2), 139–149. <https://doi.org/10.1007/s11294-012-9348-1>
- Fitrianasari, R. N. (2021). Analysis The Impact of Globalization, Fiscal Policy, and Human Capital on Inclusive Economic Growth : A Case Study on Panel Data 9 Districts in East Kalimantan Province. *Buletin Statistika Dan Aplikasi Terkini*, 1(2), 29–38.
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>
- Jaelani, A. (2020). Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 In Islamic Economic Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(September 2017), 1–11.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Palgrave MacMillan, UK.
- Medee, P. N. and, & Nenbee, S. G. (2011). Econometric Analysis of the Impact of Fiscal Policy Variables on Nigeria'S Economic Growth (1970 -2009). *International Journal of Economic Development Research and Investment*, 2(1),

171–183.

- Nurlia, N., Suar, A., Bastian, A., & Santosa, T. A. (2023). Kajian Meta-Analisis: Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 4358–4366. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3995>
- Nursini, N. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Effect of Fiscal Policy and Trade Openness on Economic Growth in Indonesia: 1990-2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 358–364. <http://www.econjournals.com>
- Riani, R., & Hr, I. (2022). The Influence of Monetary Policy Instruments on Economic Growth in Indonesia: Comparison between Islamic and Conventional Monetary Instruments Ririn & Imron The Influence of Monetary Policy Instruments on Economic Growth in Indonesia. *Ekonomi Islam Indonesia*, 4(2), 6. <http://journals.smartinsight.id/index.php/EI><http://journals.smartinsight.id/index.php/EI>
- Sriyalatha, M. A. K., & Torii, H. (2019). Impact of Fiscal Policy on Economic Growth: A Comparison between Singapore and Sri Lanka. *Kelaniya Journal of Management*, 8(1), 37–56. <https://doi.org/10.4038/kjm.v8i1.7559>
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi* (1st ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Tanjung, A., Daulay, M., & Ruslan, D. (2019). The Impact of Monetary and Fiscal Policy on Poverty in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, XIV, 1068–1073. [https://doi.org/10.14505/jaes.v14.4\(66\).12](https://doi.org/10.14505/jaes.v14.4(66).12)
- Wijayanti, A., & Ngadiman. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 3(1), 1–10. [http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB I-BAB III.pdf](http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB%20I-BAB%20III.pdf)
- Wulandari, D., Utomo, S. H., & Narmaditya, B. S. (2020). The relationship between economic growth and macroeconomic indicators in Indonesia. *Journal of International Studies*, 13(2), 139–148. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-2/10>